

## Mangilala Drwya Haji kedudukan dan perannya dalam struktur pemerintahan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20375433&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Salah satu bagian dari unsur prasasti, adalah penyebutan kelompok mangilala drwya haji. Kelompok ini terdiri dari bermacam-macam profesi. Di dalam prasasti disebutkan, bahwa mereka tidak boleh lagi memasuki daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah sama. Ada dua pendapat yang berbeda tentang mereka. Yang pertama menyatakan bahwa mangilala drwya haji adalah para penarik pajak, yang didasarkan pada arti kata mangilala drwya haji (= mengambil milik raja) dan adanya larangan bagi kelompok ini untuk memasuki daerah sima. Pendapat kedua menyatakan bahwa mereka adalah pegawai istana yang bekerja untuk raja dan keluarga. Hal ini didasarkan terhadap adanya istilah yang dikenal di Bali yaitu niaminta drwya haji, yaitu kelompok yang keberadaannya ditentukan oleh penguasa. Yang menarik untuk dikaji adalah jumlah yang ada dalam kelompok ini mencapai ratusan, sehingga memberi kesan bahwa mereka merupakan simbol dari kekuasaan raja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peran mangilala drwya haji di dalam struktur pemerintahan kerajaan kuno. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan semua prasasti dari abad XI-XV yang telah dialih aksarakan, memuat nama raja atau angka tahun dan memuat keterangan tentang mangilala drwya haji. Prasasti yang didapat berjumlah 47 buah, selanjutnya dilakukan inventarisasi jabatan-jabatan dalam daftar mangilala drwya haji, dan dicari tugasnya melalui arti katanya. jabatan-jabatan yang telah didapat, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan. Dari pengelompokan tersebut didapat jenis-jenis jabatan yang ada dalam mangilala drwya haji. Kemudian jabatan-jabatan dalam mangilala drwya haji dibandingkan untuk melihat perkembangan kelompok itu. Karena rentang waktu cukup panjang, maka untuk memudahkan dilakukan pembagian masa yaitu, abad XI sampai awal abad X (Mataram kuno), awal abad X sampai XII (Sindok-Airlangga) dan abad XIII-XV (Singhasari-Majapahit). Dari hasil perbandingan terhadap ketiga masa tersebut terlihat bahwa jumlah jabatan setiap masa berbeda. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap data yang didapat dengan literatur yang ada, dihasilkan kemungkinan yang menyebabkan perbedaan itu. Yaitu latar belakang politik, berupa adanya usaha raja untuk memperkuat kedudukan dan kekuasaan raja yang berhubungan erat dengan tujuan mendapatkan legitimasi.